

Temukan Potensi Kerugian Rp 50 M

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah berjanji bakal melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan Laporan Keuangan Pemprov Jateng tahun anggaran (TA) 2014. Sebab, kalangan DPRD Jateng meminta pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan catatan.

"Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo usai bertemu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, kemarin. Dalam pertemuan itu, BPK RI juga menyampaikan menemukan kerugian daerah di Jateng sebesar Rp 50.084.060.145,73. Dari kerugian itu baru dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp 18.086.266.488,03. Kerugian itu lebih ke administrasi seperti kelebihan pembayaran pembangunan fisik. "Dewan meminta untuk dilakukan pemeriksaan, jadi kami siap. Tergantung permintaan dewan," imbuhnya.

Selain itu, BPK RI juga menyorot kebijakan Pemprov Jateng yang memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) mendahului anggaran. Jumlahnya mencapai Rp 172 miliar. Pemberian TPP dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. "Untuk TPP harusnya mengacu pada



AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG

SIAP TINDAK LANJUTI: Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo diwawancarai usai bertemu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng di Gedung Berlian, kemarin.

Permendagri itu, jadi ada kategorisasi dan tidak bisa disamaratakan menurut golongan dan pangkat seperti yang berlaku di sini," tambahnya.

Untuk pemberian TPP harus berdasarkan lima kategori. Yakni ketimpangan beban kerja, kelangkaan profesi, disparitas lokasi, prestasi dan kinerja.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyesalkan pemberian TPP yang mendahului anggaran. Kesalahan pemberian TPP harus segera dibenahi dan disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. "Anggaran untuk gaji PNS saja sebesar Rp 1

triliun, masak untuk TPP malah justru mencapai Rp 1,1 triliun," katanya.

Rukma mengaku sudah meminta BPK RI Perwakilan Jateng untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan LHP APBD Jateng 2014. Sebab, banyak temuan lain yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Disebutkan, setidaknya ada 33 temuan dan 108 rekomendasi yang diberikan BPK dengan kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar lebih. "Kami hanya ingin apa yang tidak benar bisa dibenarkan. Ini untuk kemajuan masyarakat Jateng," tambahnya. (fth/ric/ce1)